

3 Kabupaten Belum Berikan Rencana Penyelesaian Laporan Keuangan

Pontianak, BERKAT.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar, Selasa (22/2) kemarin bertempat di Holet Murcure Jl Achmad Yani Pontianak, menggelar sosialisasi Peraturan BPK RI nomor 2 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2010.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, MH dan diikuti oleh Bupati Walikota se Kalbar, para Ketua DPRD dan Sekretaris DPRD se Kalbar. Menurut Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar Ir. Adi Sudibyo, MM, dua peraturan yang tengah disosialisasikan tersebut merupakan kelanjutan amanah Pasal 23 E ayat (2) UUD 1945, pasal 18 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004, dan pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006.

"Dari tahun 2004 sampai dengan semester dua tahun 2010, BPK telah melakukan pemantauan tindak lanjut terhadap lima belas entitas yang ada di Provinsi Kalbar," ujar Adi ketika menyampaikan sambutannya pada acara



PESERTA SOSIALISASI BPK RI DAN KEPALA BPK RI PERWAKILAN KALBAR. FOTO: DJARNI

pembukaan. Selama kurun waktu tersebut katanya, terdapat 2144 temuan dan 4313 rekomendasi, dan dari 4313 rekomendasi yang telah diberikan BPK RI, 47% telah

telah sesuai dengan tindak lanjut, 30% rekomendasi belum sesuai, serta 23% belum ditindaklanjuti.

Lebih lanjut dikatakannya, BPK RI

akan melaksanakan pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010 pada Minggu ke dua Maret 2011 dalam dua tahapan, dan tahap satu diharapkan akan selesai April 2011 mendatang serta tahap dua akan selesai pada Juni 2011.

"Saat ini ada tiga kabupaten yang belum memberikan informasi rencana penyelesaian Laporan Keuangan, yakni masing-masing Bengkayang, Sanggau dan Landak," ungkap Adi Sudibyo.

Dia juga mengimbau agar pemerintah daerah di Kalbar untuk selalu meningkatkan capaian opini hasil pemeriksaan. Dia mencontohkan, Pemerintah Provinsi Kalbar pada tahun lalu, dari opini disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

"Saya berharap, semoga opini Pemerintah Provinsi Kalbar dapat ditingkatkan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan ini hendaknya dapat diikuti oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota se Kalbar," pungkas Adi Sudibyo. (jar)